

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi, dunia menghadapi berbagai isu mendesak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia. Masalah lingkungan hidup, seperti perubahan iklim dan kerusakan ekosistem, telah mengancam keberlanjutan planet ini, dengan dampak yang meluas mulai dari kenaikan permukaan air laut hingga bencana alam yang semakin sering terjadi (IPCC, 2021). Selain itu, konflik internal maupun antarnegara turut memperburuk situasi, menciptakan gelombang pengungsian besar-besaran yang mencapai angka tertinggi dalam sejarah, dengan lebih dari 100 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat perang dan kekerasan (UNHCR, 2022). Krisis kemanusiaan ini semakin diperburuk oleh kemiskinan yang meluas, diskriminasi berbasis etnis, agama, ras, dan kelompok sosial, serta wabah penyakit yang menghambat pembangunan manusia secara global (WHO, 2023). Tak hanya itu, kelaparan akut juga meningkat, dengan lebih dari 800 juta orang mengalami kekurangan pangan kronis, sebagian besar berada di wilayah yang terdampak konflik dan perubahan iklim (FAO, 2022). Situasi ini menuntut respons kolektif dan komitmen global untuk mengatasi berbagai tantangan yang saling berkaitan tersebut guna menciptakan dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Berbagai isu global di atas, saat ini bukan menjadi masalah bagi satu negara atau sekelompok orang saja. Melainkan menjadi perhatian seluruh masyarakat dunia. Kecepatan teknologi (terutama di era Revolusi Industri 4.0) membantu seseorang di negara lain menerima berbagai informasi atas berbagai isu yang terjadi melalui jaringan internet yang amsim. Tidak jarang berbagai respon diberikan di berbagai negara untuk menyelesaikan isu tersebut. Apakah itu sebagai bentuk etika global melalui solidaritas sesama manusia atau sebagai perlawanan dari ketidakadilan melalui perjuangan universal.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) global merupakan konsep pendidikan yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan sikap yang diperlukan untuk menjadi warga dunia yang bertanggung jawab dalam menumbuhkan sikap multikultural. Konsep ini penting untuk

diterapkan dalam pendidikan di Indonesia karena konstruk masyarakat yang beragam baik dari suku, ras, bahasa, dan budaya. Pada era globalisasi dimana terjadi transformasi tentang ruang dan waktu dalam kehidupan manusia (Giddens, 2000 hlm. 35). Tanpa disadari tindakan yang dilakukan oleh seseorang akan berimplikasi secara global dan mempengaruhi kehidupan orang lain. Isu-isu global menjadi perhatian warga dunia.

Perkembangan PKn dalam konteks global lahir dan berkembang sejalan dengan adanya kecenderungan global yang diikuti gerakan demokratisasi. Gerakan ini merupakan respon terhadap perubahan yang begitu cepat dalam segala aspek kehidupan. Seperti gerakan sosial masyarakat yang menuntut penyelesaian isu-isu global/dunia yang lebih berkeadilan melalui partisipasi aktif warga negara. Karakteristik PKn dalam konteks global dicirikan dengan adanya kesadaran dan tanggung jawab warga sebagai bagian dari masyarakat global dalam merespon isu-isu dunia.

Dalam buku *Education as Humanitarian Respons: Education as a Global Concern* yang dipublikasikan di tahun 2011, Pendidikan sebagai Respon kemanusiaan Konflik-konflik yang paling mudah dan menyebar dan sangat penting sekaligus paling berbahaya adalah konflik antara orang-orang yang memiliki entitas-entitas budaya yang berbeda-beda, seperti pertikaian antar suku dan konflik antar etnis (Huntington, 2012 hlm. 9). Hal ini juga dikemukakan oleh Jacques Delors (dalam Huntington, 2012 hlm. 10) bahwa konflik-konflik yang terjadi dimasa yang akan datang lebih disebabkan faktor budaya daripada faktor ekonomi maupun ideologi. Serta menjadi konflik kultural yang paling berbahaya terjadi sepanjang persinggungan antar peradaban (Huntington, 2012 hlm. 5). Apa yang dikemukakan oleh Huntington di atas, serta melihat berbagai peristiwa konflik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa entitas-entitas budaya sangat berpotensi memicu timbulnya konflik di suatu negara.

Ketegangan yang muncul akibat perbedaan nilai, tradisi, dan identitas kultural sering kali menjadi sumber perselisihan, baik di tingkat lokal maupun global. Dalam konteks Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya, agama, dan etnis yang luar biasa, potensi konflik semacam ini dapat diminimalkan melalui penguatan nilai-nilai kebhinekaan. Implementasi semboyan

Bhineka Tunggal Ika, yang menjadi corak bangsa Indonesia, diterapkan dalam pendidikan multikultural di dunia pendidikan sebagai upaya untuk menanamkan sikap saling menghormati, toleransi, dan kebersamaan di tengah perbedaan. Pendidikan multikultural ini menjadi instrumen penting dalam membangun generasi muda yang memiliki kesadaran global tanpa kehilangan akar identitas lokal.

Secara teoritis maupun praktek pengalaman hidup sebagai bangsa, kondisi masyarakat yang bercorak multikultural bermakna ganda. Kondisi multikultural tersebut dimaknai sebagai kekayaan yang memberikan pengalaman hidup (Wulandari, 2020. hlm. 9-10). Pengalaman hidup tersebut dapat muncul karena adanya berbagai perbedaan baik dari aspek etnisitas, agama, kepercayaan, maupun budaya (*best practices*). Sesuai dengan semboyan di atas, bangsa yang multikultural memiliki peluang terjadinya konflik horizontal yang tinggi. Peluang konflik horizontal tersebut disebabkan karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keragaman suku, etnis, agama dan budaya yang dimiliki. Keberagaman tersebut tentu memiliki potensi konflik horizontal yang tinggi karena perbedaan yang dimiliki memiliki nilai kebenaran yang beragam jika tidak disikapi dengan bijak dan dewasa.

Potensi konflik yang terjadi dikarenakan masih rendahnya cara Masyarakat dalam menyikapi perbedaan corak bangsa Indonesia. salah satu yang sering terjadi adalah konflik perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA). Rendahnya sikap Masyarakat Indonesia dalam menyikapi perbedaan tersebut dikarenakan masih tingginya sikap chauvinism atau kecintaan terhadap keunggulan suatu daerah. Kondisi tersebut sesuai dengan yang disampaikan Simmons (2002. hlm. 623) menyatakan bahwa Konflik SARA ini memiliki potensi sebagai bagian pemicu terjadinya konflik, baik konflik horizontal antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras dan juga budaya. (Simmons, 2002. hlm. 623).

Berdasarkan potensi konflik yang dilatarbelakangi oleh unsur SARA di atas pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan melalui Undang-undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. UU ini bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, serta mempromosikan kesetaraan dan keadilan di seluruh Masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kebijakan pemerintah di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keberagaman bangsa tidak dapat dilakukan pemaksaan untuk dapat disamakan dengan suku lain tetapi harus diberikan kesetaraan dalam kedudukan manusianya.

Parekh menyatakan bahwa konsep kesetaraan antar manusia jika dikaji dari perspektif multikultural adalah manusia memiliki kesetaraan secara kodrati namun tidak setara secara budaya atau baik adat maupun kebiasaan (Parekh, 2010. hlm. 11). Sesuai dengan pandangan diatas, maka dapat dimaknai bahwa secara kodrat manusia telah memiliki hak asasi manusia secara individu baik dalam kedudukannya sebagai warga negara dalam implementasi hak dan kewajibannya dilindungi oleh konstitusi.

Kesetaraan atau persamaan tidak hanya berarti persamaan status manusia. Kesetaraan adalah sikap mengakui adanya persamaan, persamaan hak dan kewajiban yang sama sebagai sesama manusia (Sentiya, 2022. hlm. 24-30). Sesuai dengan kajian tersebut dapat disimpulkan bahwa penghargaan dan politik pengakuan merupakan bagian dari suatu konsep kesetaraan. Sesuai dengan pendapat konsep kesetaraan terdapat penghargaan dan politik pengakuan. Sesuai dengan pernyataan Louise Gosset terdapat keterkaitan antara toleransi, penghargaan dan pengakuan serta pengetahuan (Habibah & Setyowati, 2022. hlm. 126-135).

Sesuai dengan pemaparan kebijakan serta penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan dalam keberagaman dapat mewujudkan suatu keharmonisan dengan toleransi yang diterapkan. Namun realitanya sikap intoleransi masih berkembang di Indonesia. Berdasarkan survei Setara Institute, kelompok pelajar yang intoleran aktif mencapai 5% pada tahun 2023, naik dari 2,4% sebelumnya. Sementara itu, kelompok pelajar yang terpapar intoleransi mencapai 0,6%, naik dari 0,3% sebelumnya.

Untuk menumbuhkan kesetaraan dalam sikap multikultural tersebut salah satunya melalui implementasi PKn global di Lembaga Pendidikan formal di semua jenjang. Hal ini sesuai dengan opini Yani (2020) yang menyatakan bahwa Transformasi nilai multikultur bagi segenap bangsa dilakukan melalui berbagai upaya. Salah satu upaya tersebut adalah pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan bentuk pendidikan yang diselenggarakan secara berjenjang baik secara

umum maupun khusus. Jenjang pendidikan melalui program wajib belajar (wajib) 12 (dua belas) tahun ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan formal adalah SD, SMP, dan SMA.

Transformasi nilai multikultural melalui jalur pendidikan formal di atas sebagai langkah preventif terjadinya konflik sosial maupun konflik berkaitan dengan beragamnya latar belakang siswa, juga berkaitan dengan radikalisme adanya arah membelah kesatuan bangsa (Yani et al., 2020. hlm. 66). Upaya yang dilakukan pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan, riset dan teknologi bahwa transformasi nilai multikultural tersebut dilakukan melalui assessment nasional yang ditujukan kepada satuan pendidikan tanpa terkecuali. Keterlibatan warga sekolah dalam pelaksanaan asesmen nasional tersebut diantaranya siswa, guru, dan manajemen sekolah. Berdasarkan gambaran assessment nasional di atas jika dikaitkan dengan fokus penelitian ini yaitu PKn berbasis global dalam menumbuhkan sikap multikulturalisme, maka indikator yang sesuai untuk dijadikan sebagai dasar penelitian ini dilakukan adalah indikator iklim satuan pendidikan.

Iklim satuan pendidikan merupakan asesmen lingkungan sekolah dari aspek prakondisi dalam pembelajaran. Aspek dalam iklim satuan pendidikan adalah keamanan dan kebhinekaan. Iklim kebhinekaan merupakan salah satu suasana yang mencerminkan toleransi keberagaman terhadap hak semua warga sekolah baik dari perspektif gender, sosial ekonomi, budaya, politik, agama, maupun ciri fisik. Toleransi tersebut dimaknai sebagai upaya satuan pendidikan dalam menghargai perbedaan tanpa diskriminasi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan gambaran di atas esensi yang dapat diharapkan oleh pemerintah adalah pendidikan tanpa diskriminasi. Sesuai dengan hasil survey atau assesment nasional tersebut dapat membantu satuan pendidikan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan pendidikan secara berkualitas yang menyeluruh baik dari segi pengetahuan, keberagaman, dan sikap. Jika *dibreakdown* kebermanfaatan hasil assessment yang berbentuk raport pendidikan ini salah satu provinsi yang menjadikan rapor pendidikan sebagai acuan dalam perencanaan pendidikan berkelanjutan adalah provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil rapor pendidikan provinsi jawa timur merupakan provinsi yang memiliki

pendidikan dengan iklim kebhinekaan pada semua jenjang pendidikan dengan kategori membudaya. Hal ini dapat dimaknai bahwa upaya intervensi yang dilakukan dalam transformasi pendidikan multikultural telah tepat dan sesuai.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang melakukan kajian tentang keberagaman di Masyarakat. Ketepatan dan kesesuaian tersebut dapat ditelaah bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki beragam suku, agama dan budaya yang beragam seperti Madura, Jawa, dan Osing. Transformasi pendidikan multikultural sangat penting diterapkan pada semua jenjang pendidikan formal.

Pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) misalnya pada jenjang tersebut peserta didiknya merupakan remaja fase awal yaitu usia 13 – 16 tahun. Pada fase usia tersebut perubahan pola pikir dan upaya mencari identitas diri menjadi ciri fase remaja awal. Selain itu pola hubungan sosial juga terjadi perubahan seiring berkembangnya teknologi dan arus globalisasi. Menurut Agustina dan Bidaya (2018. hlm. 55-62) bahwa ‘transformasi pendidikan multikultural sangat diperlukan untuk meminimalisir sikap negatif seperti *bullying*, diskriminasi dan sebagainya dapat ditekan’ (Agustina & Bidaya, 2018. hlm. 55-62).

Merujuk pada Nomenklatur Pendidikan Pancasila di tingkat SMP mencakup integrasi nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), yang bertujuan membentuk karakter siswa sebagai warga negara yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sekaligus memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya. Pendidikan Pancasila yang diimplementasikan melalui PKn tidak hanya mengajarkan tentang prinsip-prinsip ideologi bangsa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan cinta tanah air. Materi yang diajarkan meliputi pengenalan sistem pemerintahan, hak asasi manusia, keberagaman budaya, serta partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pendekatan yang relevan dan kontekstual, siswa diajak untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas sebagai bangsa Indonesia.

Dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Global, perbedaan antara civic education dan citizenship education menjadi sangat relevan untuk

dipahami, mengingat keduanya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk warga negara yang berwawasan global dan berperan aktif dalam masyarakat multikultural. Pendidikan ini tidak hanya fokus pada kewajiban nasional tetapi juga pada pengembangan sikap dan pengetahuan yang memungkinkan individu untuk berkontribusi dalam komunitas global.

Citizenship education dalam konteks PKn global menekankan pada pembentukan identitas kewarganegaraan yang tidak hanya terbatas pada identitas nasional, tetapi juga pada pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai anggota komunitas global. Pendidikan ini mengajarkan bahwa kewarganegaraan bukan hanya soal status legal dalam suatu negara, tetapi juga soal kesadaran akan peran individu dalam komunitas dunia. *Citizenship education* mengajarkan siswa tentang hak asasi manusia, hak untuk mendapatkan pendidikan, akses ke layanan dasar, dan perlindungan terhadap diskriminasi yang harus dipenuhi oleh setiap negara dan masyarakat di dunia. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan global, citizenship education memperkenalkan konsep kewarganegaraan global yang mengajarkan siswa untuk mengidentifikasi diri mereka tidak hanya sebagai warga negara suatu bangsa, tetapi juga sebagai bagian dari komunitas internasional yang harus berperan aktif dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan damai.

Sesuai dengan gambaran tersebut peran manajemen sekolah dalam upaya menerapkan iklim kebhinekaan pada siswa di jenjang SMP sangat penting untuk ditumbuhkan sebagai bagian preventif. Berdasarkan rapor pendidikan yang dikeluarkan oleh mendikbud pada jenjang SMP di Surabaya adalah sudah membudaya sedangkan untuk keseluruhan SMP di Jawa Timur menunjukkan bahwa iklim kebhinekaan satuan pendidikannya berstatus merintis. Hal ini menggambarkan bahwa adanya pemerataan kesetaraan dalam jenjang pendidikan tersebut sudah dijalankan secara efektif dan tepat sasaran di SMP Se Kota Surabaya. Hal ini juga sejalan dengan apa yang menjadi tugas pemerintah untuk menggalakan PKn global atau yang dikenal dengan istilah *global citizenship education (GCE)*.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas dapat disampaikan bahwa penelitian tentang PKn berbasis global dalam menumbuhkan sikap multikulturalisme siswa pada jenjang SMP di Kota Surabaya Jawa Timur memerlukan kajian mendalam tentang program yang diterapkan dalam upaya

membudayakan iklim kebhinekaan sebagai implikasi menumbuhkan sikap multikulturalisme pada siswa jenjang SMP se kota Surabaya dapat terlaksana dan membudaya.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka ada beberapa permasalahan penelitian baik secara umum maupun khusus diantaranya:

a. Rumusan umum

Bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) global mampu menumbuhkan sikap multikultural pada siswa jenjang SMP Surabaya Jawa Timur?

b. Rumusan khusus

1. Bagaimana PKn Global sebagai program sekolah pada jenjang SMP di Kota Surabaya?
2. Bagaimana cetak biru PKn global pada program sekolah dalam menumbuhkan sikap multikultural pada peserta didik di SMP di Kota Surabaya?
3. Bagaimana proses pembudayaan PKn Global di Sekolah dapat menumbuhkan sikap multikultural pada siswa?

1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang PKn global mampu menumbuhkan sikap multikultural dengan studi fenomenologi pada siswa jenjang SMP Surabaya Jawa Timur baik secara umum maupun khusus sebagai berikut :

a. Tujuan umum

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian secara umum adalah mendapatkan gambaran yang mendalam tentang fenomena PKn global mampu menumbuhkan sikap multikultural.

b. Tujuan Khusus

- 1 Mendeskripsikan Pkn Global sebagai program sekolah di jenjang SMP di Kota Surabaya

- 2 Menganalisis cetak biru PKn global pada program sekolah dalam menumbuhkan sikap multikultural pada peserta didik di SMP di Kota Surabaya
- 3 Menganalisis proses pembudayaan Pkn Global di Sekolah dapat menumbuhkan sikap multikultural pada siswa

1.3 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu memberi manfaat baik secara teoritik, praktik dan sosial

1. Teoritik

Penelitian ini memberikan manfaat tentang pembelajaran PKn global berbasis multikultural untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan global pada siswa sebagai bagian dari warga negara global.

2. Praktik

a. Para akademisi

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai bahan rujukan dan masukan kepada praktisi pendidikan bahwa PKn memiliki peran dalam menjaga keragaman bangsa Indonesia baik secara lokal, nasional, bahkan global.

b. Para pengembang kurikulum PKn

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian tentang pengembangan dan penguatan kompetensi siswa sebagai warga negara global. Kompetensi global tersebut dimaknai memperkuat nilai multikultural dan nasionalisme namun memiliki pemikiran global.

c. Para pengambil kebijakan

Penelitian ini diharapkan memberi rekomendasi berupa kerangka konseptual tentang pentingnya kompetensi global di Sekolah untuk menumbuhkan multikultural. Untuk itu, penelitian ini menjadi bahan studi bagi pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah tentang urgensi kesadaran global dimasukkan sebagai bagian kajian dalam mata pelajaran PKn di Sekolah.

d. Peneliti lanjutan

Menjadi referensi bagi peneliti peneliti selanjutnya untuk lebih memperdalam tentang kompetensi yang harus diperoleh bagi siswa dengan memahami PKn

global sebagai bagian dari warga negara global serta peneliti dalam bidang-bidang ilmu sosial.

3. Sosial

Penelitian ini memberikan manfaat sosial yang mendalam dengan mendorong siswa SMP di Kota Surabaya untuk memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai multikultural secara autentik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu menjadi agen perubahan yang aktif dalam membangun harmoni sosial, mencegah konflik berbasis perbedaan, serta memperkuat kohesi sosial di tengah keberagaman budaya, agama, dan etnis di Masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan disertasi ini menggunakan panduan penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2021. Disertasi ini terdiri dari 5 (lima) Bab. Pada setiap bab nya akan mengkaji beberapa subbab di dalamnya antara lain:

BAB I. Pendahuluan. Pada bab tersebut terbagi dalam 5 (lima) bagian yakni pertama latar belakang masalah, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian. Manfaat penelitian, dan kelima struktur organisasi disertasi.

BAB II. Kajian Pustaka. Pada bab ini merupakan bab yang mengkaji tentang kerangka teori atau landasan teori yang terdiri atas berbagai teori-teori yang mendukung penelitian dan penulisan disertasi seperti tentang PKn meliputi visi dan misi PKn, PKn global, Kompetensi Kewarganegaraan global, Peran signifikan PKn untuk transmisi nilai-nilai, Multikulturalisme, Multikulturalisme dalam PKn global, juga tentang penelitian terdahulu.

Bab III. Metodologi Penelitian. Desain penelitian. Pendekatan penelitian, partisipasian dan tempat penelitian, instrumen penelitian, dan teknik pengumpulan data dan juga analisis data yang relevan.

Bab IV. Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini secara umum berisi dua hal yakni temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian. Pada temuan penelitian, diuraikan hasil penelitian yang diperoleh baik melalui teknik pengumpulan data yang utama atau primer yakni hasil wawancara dengan para

narasumber, dan hasil melalui teknik pengumpulan data sekunder melalui pengamatan dan analisis dokumentasi yang sesuai. Bagian kedua adalah pembahasan temuan penelitian, dimana pada bagian ini, peneliti menguraikan pembahasan terhadap hasil penelitian, dengan mengaitkan data lapangan dengan konsep dan teori yang relevan dengan penelitian ini. Agar sistematis, maka dalam pembahasan hasil penelitian ini, diurutkan sesuai dengan urutan rumusan masalah sebagaimana terdapat dalam Bab II sebelumnya.

Pada Bab V. Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Pada bab ini berisi uraian tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi. Uraian kesimpulan berisi hal-hal pokok dari hasil penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan rekomendasi berisi saran kepada beberapa pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini, seperti untuk guru, siswa, orang tua, dan masyarakat serta pemerintah.